

	News Title : Bappebti Gelar Edukasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Bumi Nyiur Melambai Manado	
	Media Name : jakartadaily.id	Journalist : Sontry Napitupulu
	Publish Date : 10 May 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Purwo Yemianto (Direktur Utama PT Victory International Futures), Nursalam (Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Perdagangan Berjangka Komoditi

Ekonomi & Bisnis

Bappebti Gelar Edukasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Bumi Nyiur Melambai Manado



bappebti | @bappebti | jakartadaily.id

JAKARTADAILY.ID - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, perdagangan berjangka komoditi (PBK) relatif tidak terdampak pandemi Covid-19 dan transaksinya relatif stabil. Dengan demikian, Bappebti kepada masyarakat mustah harus digencarkan untuk mendukung penguatan peran PBK.

Demikian diungkapkan Didid dalam diskusi panel Literasi PBK yang digelar di Manado, Sulawesi Utara yang beresergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadinda) Sulawesi Utara dan PT Victory International Futures. Acara mengusung tema "Penguatan Peran dan Fungsi Bappebti dalam Perdagangan Berjangka Komoditi" dan dihadiri pelaku industri PBK serta masyarakat.

"Peningkatan PBK perlu terus didorong agar mampu memberikan kontribusi pada pembangunan perekonomian di Indonesia, karena untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, ekonomi dan perdagangan Indonesia diharapkan menjadi negara berpendapatan tinggi dan produk domestik bruto (PDB) sebesar 16-18 triliun pada 2045," jelas Didid, Selasa, 9 Mei 2023.

Didid melanjutkan, berbagai upaya maksimal perlu dilaksanakan dalam peningkatan daya saing ekspor serta inovasi teknologi sehingga Indonesia diprediksi menjadi negara peng ekspor sebesar 10-15 juta dengan pangsa pasar 2 persen dari ekspor barang dan jasa dunia 2045.

Didid juga menyuarai industri PBK di Indonesia yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Tindakan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan industri PBK sebagai kedok dalam melakukan kegiatan investasi ilegal menjadi tantangan terbesar yang dihadapi saat ini.

Masyarakat harus pandai membedakan investasi PBK yang legal (benar) dan tidak legal dengan mengidentifikasi ciri-ciri. Daftar perusahaan PBK yang berizin dari Bappebti dapat dilihat di situs web www.bappebti.go.id atau melalui saluran info@telegrafplus.bappebti.go.id.

"Sebagai upaya kehati-hatian terhadap kephatan yang berkedok PBK, masyarakat harus mengetahui beberapa modus yang sering dilakukan, seperti penipuan berkedok transaksi PBK, perjudian dengan data transaksi kontrak PBK, dan money game atau perdagangan dengan skema pond. Kegiatan legal berkedok PBK juga terjadi melalui penawaran paket investasi menggunakan robot trading dengan skema pond. Keuntungan yang terjadi dari modus investasi tersebut adalah pembayaran keuntungan kepada para anggota dari dompet sendiri dan dana dari anggota baru yang berhadiah dengan (member get member)," ujar Didid.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Nursalam juga turut mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak bertransaksi PBK sebelum benar-benar memahami industri ini. PBK bersifat high risk, high return. Dengan kata lain, potensi keuntungan yang besar akan seiring dengan kemungkinan kerugian yang tidak kalah besar. "Kami terus berupaya mengencangkan edukasi dan literasi kepada masyarakat dan kelompok-kelompok usaha dari kami ke kampus. Memberikan kayaan informasi yang mudah dimonetisasi masyarakat dan sangat terbuka untuk berdiskusi," ujar Nursalam.

Pada awal acara, perwakilan KADIN Sulawesi Utara Jeffy Dekause mengungkapkan apresiasi atas literasi yang dilaksanakan Bappebti ini. Kegiatan ini merupakan momen penting dan bermakna mengingat masyarakat Sulawesi Utara masih banyak yang belum memahami PBK. Industri PBK yang sehat juga harus tumbuh di Sulawesi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik agar masyarakat tidak salah arah dan berjerumus dalam kegiatan aktivitas ilegal seperti money game," ungkap Jeffy.

Adapun Direktur Utama PT Victory International Futures Purwo Yemianto menyatakan bahwa kegiatan literasi di Sulawesi Utara merupakan rangkaian besar Badan Literasi PBK itu. "Meskipun Literasi PBK telah diupayakan ke seluruh Indonesia, namun upaya kita bersama tidak berhenti. Subagaimana arahan Kepala Bappebti, selaku industri tetap perlu mengedukasi dan memberikan pemahaman PBK yang sehat dan benar kepada masyarakat. Langkah ini juga untuk mengembalikan citra positif industri PBK dan kepercayaan masyarakat," tutur Purwo.

Di sela-sela kegiatan tersebut, sekretaris Bappebti Chyri Andrianto juga menekankan perlunya sinergi yang kuat Bappebti dengan segenap pemangku kepentingan. "Tidak semata-mata pada pengetahuan industri saja, tapi juga tentang mekanisme transaksi, produk yang diperdagangkan, sampai dengan daftar pelaku usaha yang berizin dari Bappebti sehingga potensi permasalahan yang ada dapat diminimalisir," jelas Chyri.

Sementara dalam sambutan pembuka, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Daniel Kewenangan menyampaikan, kemajuan suatu daerah, bangsa, dan negara akan tercipta apabila terjadi hubungan atau sinergi yang baik antar berbagai pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam konteks ini, pelaku usaha di bidang perdagangan memegang peranan yang sangat strategis terutama di saat pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi dan peluang pembangunan di segala bidang untuk kemajuan Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Didid memberikan penjelasan terkait penguatan kewenangan pengawasan perdagangan derivatif melalui sinergi antara Bappebti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penguatan dan Pengawasan Sektor Keuangan (UU PPSK).

“Perdagangan berjangka memiliki risiko yang tinggi untuk mempengaruhi stabilitas keuangan. Secepatnya, akan dilakukan sinergi pengawasan terhadap perdagangan derivatif antara **Bappebti** dengan **OJK**. Saat ini, sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut,” jelas Didid.

Didid juga menyinggung rencana pembentukan harga acuan (price reference) komoditas crude palm oil (**CPO**) di Indonesia yang dicanangkan terbentuk tahun ini dengan kebijakan ekspor **CPO** melalui bursa. Indonesia sebagai negara penghasil **CPO** terbesar dunia sudah selayaknya memiliki harga acuan dengan mata uang sendiri (rupiah).

“Sudah saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, salah satu caranya memiliki harga acuan dengan mata uang rupiah. Melalui kebijakan ini, tata kelola perdagangan **CPO** diharapkan akan lebih wajar dan transparan. Negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak,” tandas Didid.
